UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albrow, Martin, 2007, *Birokrasi,* Tiara Kencana, Yogyakarta

Arifin, Zainal Hoesein dan Arifudin, 2017, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Badan Kepegawaian Negara, 2019, *Statistik Pegawai Negeri Sipil,* Jakarta

Badoh, Ibrahim Fahmi dan Abdullah Dahlan, 2010, *Korupsi Pemilu di Indonesia,* Jakarta, Indonesia Corruption Watch dan Yayasan TIFA

Berbara, Geddes, 1994, *Politicians's Dilemma 'Building States Capacity in Latin America',* University of California, Los Angeles

Bentham, David, 1990, *Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta

_____ dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta

Blau, Peter dan Marshal W Meyer, 2000, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern,* Prestasi Pustakaraya, Jakarta

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik* , Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*., Liberty , Yogyakarta

Djohan, Djohermansyah 1990, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I, Bumi Aksara, Jakarta

Dwiyanto Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

_____, 2015, *Reformasi Birokrasi Kontekstual*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Fajar, Mukhtie, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi,* Setara Press, Jawa Timur

Eva Etzioni Halevy, 1983, *Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma*, Boston: Routledge

Farazmand, Ali., 2009, *Bureaucarcy and Administration,* Boca Raton, CRC Press

Gaffar, Janedjri M., 2012, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,* Konstitusi Press, Jakarta

Gaffar, Janedjri M., 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,* Konstitusi Press, Jakarta

G.B Peters and Pierre, P. 2001. *Politicians, Bureaucrats and Administration Reform*. USA: Routledge

Haris, Syamsuddin, 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta

Hartini, Sri, dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Harun, Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan, ,* RajaGrafindo Persada, Jakarta

_____, 2019, *Politik Keledai Pemilu : Catatan Hukum Refly Harun,* RajaGrafindo Persada, Jakarta

Henry, Nicolas, 1988, *Adminisstrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*, Rajawali Press, Jakarta

Huda, Ni'matul, dan Imam Masef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilihan Umum Di Indonesia Pasca Reformasi,* Kencana, Jakarta

Iskatrinah, 2004, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan, Jakarta

Imawan, Riswanda, 2000, *Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa*, Gramedia, Jakarta

Jeddawi, Munir, 2009, *Karir PNS di Persimpangan Jalan: Sebuah Refleksi Atas Kebijakan Kepegawaian Di Era Otonomi Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum,* Kencana, Jakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Karianga, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Kencana Prenada Media, Jakarta

Kumontoro, Wahyudi, 2005, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta

Komisi Aparatur Sipil Negara, 2016, *Laporan Kinerja tahun 2016, Badan Pengkajian dan Pengembangan Sistem*, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta

Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara,* Badan Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta

Liddle,William, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta,

LIPI, 2006, *Netralitas PNS dalam Pemilukada,* Jakarta

Mahfud, Mohammad, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta

_____, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta

Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan keempat Liberty, Yogyakarta

Moertopo, Ali, 1974, *Strategi Politik Nasional,* CSIS, Jakarta

Mohsen, Nuraida, 2018, *Focus Group Discussion: Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, tidak diterbitkan, Jakarta

Noer, Hamka Hendra, 2014, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia, Studi Zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Nurmadjito dkk, 2007, *Kompendium tentang Perilaku Aparat Negara*, Badan Pengembangan Hukum Nasional, Jakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pramusinto, Agus dan Wahyudi Kumorotomo (Ed.). *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*., Gava Media, Yogyakarta

Raharjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bhakti, Bandung

Robbins, S.P. 1990. *Organization Theory: Structure, Designs, And Applications*. Third Edition. Prentice-Hall International, Inc, London

Santoso, Priyo Budi,1993, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Santoso, Topo, dkk, 2006, *Penegakkan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004 dan Kajian Pemilu 2009-2014*, Perludem, Jakarta

Sardini, Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Media Press, Yogyakarta

Satoto, Sukamto2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, CV Hanggar Kreator, Yogyakarta

Schmidt, W Steffen & James C. Scott (eds.). *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, xiii - xxxvii. Berkeley: University of California Press

Schoorl, 1984, *Modernisasi*, Gramedia, Jakarta

Setiyono, Budi, 2012, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Nuansa, Bandung

Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang,

Soebhan, Syafuan Rozi, 2000, *Model Reformasi Birokrasi di Indonesia*, LIPI, Jakarta

Suhadi, Imam, 1981, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Sorensen, G, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sudiman, 2009, Netralitas Birokrasi dalm Politik : Studi Kasus Tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007 dan Banten Tahun 2006, *Disertasi,* Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sudrajat, Tedi, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintahan: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Surbakti, Ramlan, dkk, 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cet I, Kemitraan, Jakarta

Supriyanto, Didik, 2015, *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, P3DI dan Azza Grafika, Jakarta

Susetyo Wasis dkk, 2015, *Laporan Akhir : Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*, BPHN, Jakarta

Syaukani, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Thoha, Miftah, 1992, *Perilaku organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, CV. Rajawali, Jakarta

_____, 2003, *Kepemimpinan dalam Menejemen : Suatu Pendekatan Perilaku*, Raja Garfindo, Jakarta

_____, 2008, *Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

_____, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta

_____, 2009, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

_____, 2010, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Tjokrowinoto, Moeljarto 2001, *Birokrasi dalam Polemik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Utomo Warsito,,2005, *Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompabilitas menjadi Budaya Birokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia, Jakarta

Widodo, Heru, 2018, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Winarno, Budi. 2011, *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus. Edisi Revisi dan Terbaru,* CAPS, Yogyakarta

Yuliani, Sri, 2004, Netralitas Birokrasi : Alat Politik atau Profesionalisme ?, Program Studi Administrasi Negara FISIP UNS

Zauhar, Soesilo, 1996, Reformasi Administrasi: Konsep dan Strategi, Bumi Aksara, Jakarta

Karya Ilmiah

Amin, 2013, Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008), *Tesis,* Fakulutas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanudin, Makasar

A, Patria, 2015, Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, *Tesis,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung

Eka Adhi, Aswin, 2015, Pola Netralitas Birokrasi Pemerintah: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2008 (Era Orde Baru, Era Transisi dan Era Reformasi)", Program Doktor Ilmu Administrasi Negara UGM Yogyakarta

Halim, 2013, Sistem Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Kerangka Reformasi Birokrasi, *Disertasi,* Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar

Isharyanto, Johan Erwin, 2008, Pelaksanaan Prinsip Netralitas Birokrasi : Model dan Pelembagaan (Studi Kasus di enam Pemerintah Kabupaten dan Kota), *Laporan Penelitian Hibah Bersaing,* Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Kadir, Abdul. 2011, Karakteristik Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, *Tesis,* Universitas Hasanudin, Makasar

LA, Purba, 2010, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, *Tesis,* Universitas Indonesia, Jakarta

Madril, Oce, 2018, Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Pemerintahan (Analisis Kebijakan Anti-Korupsi

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Presiden), *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Rahman, Muhammad Sayadur, 2015, Politics-Bureaucracy Relations, Governance and Development in Bangladesh: The Case of Local Government, *Dissertation,* Universitas Heidelberg, German

Sihontang, Lia Eldest, 2013, Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus : Ketidaknetralan Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011), *Tesis*, Program Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Watunglawar, 2015, Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Tesis*, Universitas Jember, Jember

Yamin, Muhammad Halwan, 2013, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar. Makasar, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar

Makalah

Effendi, Sofian, 1999, "Kebijakan kepegawaian Negara dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan pasca Pemilu 1999", *Makalah,* BKN, Jakarta

_____, 2013, "Godot dan Reformasi Birokrasi", *Makalah,* BKN Jakarta

Hadjon, Philipus M., 1994, "Perlindungan Hukum dalam Negara Pancasila , Makalah simposium tentang Politik Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum", *Pidato dalam Rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga*, Surabaya 3 November 1994

Irsyam, Mahrus, 2001, "Reformasi Birokrasi, dari Politik ke Profesional", *Opini*, Kompas Rabu, 14 Maret 2001

Manihuruk A.E., 2001, "Pegawai Negeri Sipil Di awal Kemerdekaan dan Era Reformasi", *Seri kertas Kerja*, Edisi Khusus, Ulang Tahun ke 53, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Puslitbang BKN, Mei 2001, Jakarta

Mustopadidjaja, AR, 2003, "Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", Seminar Pembangunan Nasional VIII, Tema : Penegakkan Hukum Dalam Era Pembanguan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia di Denpasar, pada tanggal 14-18 Juli 2003

Riewanto, Agus, 2018, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada, *opini*, Republika edisi Selas, 6 Maret 2018

Santoso, Purwo, 2013, "Politik Netral-Aktif: Reformulasi Peran Birokrasi dalam Seleksi Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum& Pemilitan Kepala Daerah di Propinsi Bangka Belitung, yang diselenggarakan melalui kerjasamaantara Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Masyarakat Ilmu PemerintahanIndonesia (MIPI) di Novotel Bangka Golf & Convention Center, Jl. Soekarno Hatta KM 5,Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 5 Juni 2013

Sanur, Debora, 2019, Persiapan Pilkada Serentak 2020, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta

Suripto, 2010, "Konsep Netralitas Birokrasi Pegawai Negeri Sipil", *artikel*, tidak diterbitkan

Jurnal

Agus, Margono Subandono , 2005, Reformasi Administrasi dengan Paradoks Demokrasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 9 No. 1 Juli 2005

Agustino, Leo, 2014, "Patronase Politik Era Reformasi : Analisis Pilkada di Kabupaten Talakar dan Propinsi Jambi", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014

Agius, Christine and Karen Devine, 2011, "'Neutrality: A Really Dead Concept?' A Reprise," *SAGE Journals*, Vol. 6 Issue 3, 2011

Bennis Wai Yip So, 2013, Civil Service Neutrality in Taiwan : Is it Neutrality with or without Dichotomy ?, *Issues and Studies 49, no. 1 (March 2013)*

Bisariyadi, 2012, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa NegaraPenganut Paham Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 3 September 2012, Jakarta

Budiardjo, Miriam, 1990, Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 10

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dhakidae, Daniel, 1981, Pemilihan Umum Di Indonesia: Pasang Naik dan Surut Partai Politik, *Prisma* 9, LP3ES, Jakarta

Dwimawanti, Ida Hayu, 2009, "Netralitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS BKN*, Vol. 3 Juni 2009

Edison, 2011, Meritokrasi vs Politisasi Jabatan Karir dalam Birokrasi Lokal : Sebuah Paradoks Birokrasi Netral, *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, Volume 16 Nomor 1 (Mei 2011)

Editorial, 2015, *Jurnal ETIKA & PEMILU* Vol. 1, Nomor 3, Oktober 2015

Fakhrudin, Anas, 2012, "Model Hubungan antara Politisi dan Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Review Politik*, Volume 02, No 2, Desember 2012

Firnas, M Adian, 2016, "Politik dan Birokrasi : Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi", *Jurnal Review Politik* Volume 06, 01, Juni 2016

Hartini, Sri, 2009, "Penegakkan Hukum Netralitas PNS", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 Nomor 3 September 2009

Heldan, Elip, 2012, Pola Relasi Politik Administrasi dalam Rekruitmen Elit Birokrasi (Studi Pada Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat), *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik,* Vol XIII, No. 1 Juni 2012

Junaidi, Veri, 2009, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 3 Spetember 2009, Jakarta

Kernaghan, K. 1976. Politics, Policy and Public Servants: Political Neutrality Revisited. *Canadian Public Administration*, Volume 19, Issue 3, September 1976

Meier J Kenneth and Laurence J. O'Toole Jr, 2006, Political Control versus Bureaucratic Values: Reframing the Debate; Author(s), *Public Administration Review*, Vol. 66, No. 2 (Mar.-Apr., 2006)

Mengistu, Berhanu and Elizabeth Vogel, 2006, Bureaucratic Neutrality Among Competing Bureaucratic Values in an Ethnic Federalism: The Case of Ethiopia, *Public Administration Review*, March-April 2006

Muhdiarta, Untung dkk, 2016, "Model Relationship Officers of Bureaucracy and Political Officials in the Government of Papua (A Study on the Placement of Officials Structurally Echelon II)", *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 6, Issue 9, September 2016

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Murtiana, Dede, "Reformasi Birokrasi Pemerintah Pasca Orde Baru", *Jurnal Sosiohumaniora,* Vol. 8 No.3 Nopember 2006

Nadir, Sakinah, 2013, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik,* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013

Nuraini, Hikmah, 2017, Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis, *Jurnal SAWALA* Vol 5 No 1 April 2017

Noer, Hamka Hendra, 2014, Reformasi Birokrasi: Antara Netralitas Politik dan Tuntutan Pelayanan Publik, *Jurnal Paradigma,* Volume 18, Nomor 2, September 2014

Novianto, Arief, 2019, Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan dan Budaya Patron-*Client*, *Insight,* Volume 1 (2) Edisi Maret 2019

Perdana, Gema, 2019, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi, *Jurnal Negara Hukum,* Vol. 10, No. 1, Juni 2019

Pratama, Rekha Aji 2017, Patronase Dan Klientalisme Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, *Jurnal Wacana Politik* - ISSN 2502 – 9185 Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 33 – 45 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Indonesia

Rakhmawanto, Ajib. 2007. Netralitas Pegawai Negeri Sipil : Implikasinya Terhadap Kinerja dan Pelayanan Publik. *Jurnal Civil Service* Vol.1, No 1. Jakarta : Badan KepegawaianNegara 2007

Ratna, Ikhwani, 2012, Reformasi Birokrasi Terhadap Penataan Pola Hubungan Jabatan Politik dan Karir dalam Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Riau, *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012

Rina Martini, "Politisasi Birokrasi di Indonesia", *Politika Jurnal Ilmu Politik* MIP, Vol. 1 (1), 2010

Scott, J.C. 1972. "Patron-client politics and political change in Southeast Asia". *American Political Science Review* 66(1)

Selden, Sally Coleman, Gene A. Brewer, Jeffrey L. Brudney, 1999, Reconciling Competing Values In Public Administration Understanding The Administrative Role Concept, *Administration & Society*, Vol. 31 No. 2, May 1999

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sihontang, Lia Eldest, 2013, Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus : Ketidaknetralan Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011), Program Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Sudrajat, Tedi dan Agus Mulya Karsona, 2016, Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, Juni 2016

Sultana, Syeda Arifa, 2012, Bureaucratic Accountability Towards Good – Governance, *IJCAES Special Issue On Basic, Applied & Social Sciences*, Volume II, July 2012

Tamma, Sukri 2016, Paradox Of Bureaucracy Neutrality In The Indonesia Regional Election, *PALITA: Journal of Social Religi Research*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2016

Yusdianto, 2010, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, Vol II No. 2, November 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 263

Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55

Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 12

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6

Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57

Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1970 tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri dalam rangka Pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 9

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian PNS Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 26

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1999 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31

Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 304

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 384

Peraturan Pemerintah Nomor 42 thun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang larangan PNS dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
BAGUS SARNAWA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H.,M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

Surat Edaran (SE) Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959

Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Nomor 07/SE/1986

Surat Kepala Badan Kerpegawaian Negara Nomor K.26-17/V.19-14/99 perihal Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18.1/M.PAN/5/2004 tentang kriteria penjatuhan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak netral

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/08/M .PAN/2005

Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/2355/M.PANRB/07/2015, perihal Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak

Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: 36/M.SM.00.00/2018 tentang Ketentuan Bagi ASN yang Suami atau isterinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil/Calon Anggota Legislatif/Calon Presiden

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1403 tanggal 15 Pebruari 2018 kepada Bupati/Walikota se Propinsi Jawa tengah dan Kepala Satuan Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah perihal Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 201